

Etika Feminis Melawan Stigma Teokrasi-Patriarki: Refleksi Pemilihan Presiden 2014

Rocky Gerung

Departemen Filsafat, FIB, Universitas Indonesia

rockygerung@gmail.com

Abstract

Feminist politics is a perpetual investment in a just civilization. It awares of the injustice structure that is inherently located within the sociological body of patriarchal system. It needs more than voluntary-echo in democracy rather a strong conceptual tools that will enlighten the dialectic transport of communication in democratic system. Any feminists shall be alert to watch and guard, as well as, cynically, radically, monitor the run of the new-elected president—whether he will bring mandate of equality or not. Short-term strategy has been invested to block the new-order regime to take control; and long-term strategy shall be invested to guarantee the system of equality in the new cabinet.

Keywords: ethics of feminism, women, theocracy-patriarchy, presidential election.

Abstrak

Politik feminis adalah investasi peradaban. Politik feminis telah lama mengetahui bahwa menjadi perempuan dan mengalami ketidakadilan adalah satu paket sosiologi yang diselenggarakan oleh sistem patriarki. Bahwa keperluan perubahan politik tidak saja memerlukan partisipasi lapangan, tapi terlebih ketajaman diskursus dalam membaca struktur ketidakadilan itu. Itulah sebabnya diperlukan terus-menerus pemahaman teoretik yang kuat agar euforia politik lapangan itu tidak menghanyutkan peralatan-peralatan konseptual feminis, yaitu peralatan pikiran dan keyakinan tentang keadilan yang lebih radikal. Politik feminis juga memahami bahwa upaya menyelenggarakan keadilan itu, pada momen-momen kritis seperti Pemilu, memerlukan “strategi jangka pendek” untuk secara minimal mencegah masuknya watak otoritarian dalam politik.

Kata kunci: etika feminis, perempuan, teokrasi-patriarki, pemilihan presiden

Pengantar: Posisi Etis

Apakah politik merupakan peralatan perempuan? Bila perubahan hendak dicapai dalam misi kesetaraan dan pencerahan, maka keterlibatan perempuan adalah strategis. Bahkan lebih dari itu, menjadi tuntutan etis politik untuk menghasilkan perubahan yang feminis. Yaitu perubahan peradaban politik menuju penghargaan hak asasi dan pemihakan kepada *the powerless*. Gugatan itu amat politis karena perempuan menghadapi secara historis seluruh kondisi *powerless* itu. Afirmasi inilah yang mendorong partisipasi perempuan dalam politik Indonesia hari ini. Dasarnya sangat empiris. Berbagai kebijakan diskriminatif masih menguasai politik kita. Pada semua tahap pembuatan kebijakan publik, suara perempuan masih dianggap gangguan terhadap orkestrasi politik laki-laki. Hasil terakhir Indeks Pembangunan Manusia, menunjukkan stagnasi dalam capaian-capaian target pembangunan (IPM, Bappenas, 2014). Dalam perbandingan global, kesehatan dan kesejahteraan tak membaik, kualitas perundang-undangan belum berpihak kepada perempuan, akses publik perempuan terhalang oleh kultur dan doktrin agama. Semuanya adalah soal politik: desain yang belum peka terhadap hak warganegara.

Dalam lingkungan dimana intoleransi dan kekerasan masih berlangsung, di pengungsian dan wilayah konflik, kondisi perempuan bahkan berlipat buruk: kecemasan terhadap masa depan keluarganya, stigma-stigma teokratis yang menghina martabatnya, keterbatasan ruang gerak ekonomi, keputusan terhadap peran negara, semuanya menghasilkan kondisi yang melemahkan etos republikanisme sebagai dasar kehidupan bersama. Tetapi justru dalam catatan panjang tentang ketidakadilan dan pelanggaran hak sasi manusia itulah tumbuh kehendak untuk terus mengupayakan perubahan, kendati sadar akan konstanta-konstanta sosio-kultural yang masih amat kuat. Politik perempuan tiba dengan maksud etis itu: mengubah untuk bertumbuh.

Konstruksi Politik Pemilu & Politik Feminis Relawan

Kita telah melewati proses Pemilu dengan aman tapi kurang budaya. Ya, karena pertarungan politik telah berlangsung dalam kultur patriarkis: di belakang para calon, berjejer struktur kekuasaan yang sesungguhnya: feodalisme partai, para pensiunan jenderal, para oligark pemodal, para ideolog patriarkis, dan partai-partai doktriner.

Tapi juga kultur di belakang pertandingan politik itu, sesungguhnya bukan kultur demokrasi terbuka: kampanye primordial dengan acuan sentimen agama, rasis dan fitnah, adalah aktivitas utama politik pemilu itu. Memang ada fenomena bermutu: partisipasi politik publik di luar sistem partai, yaitu “politik relawan”. Tetapi fenomena ini timbul lebih sebagai kontra-politik terhadap “establishment” partai. Kita harus membaca politik relawan ini sebagai “politik feminis” pada tingkat yang minimal, yaitu sebagai tindakan sinisisme terhadap konstruksi patriarkis kepartaian kita. Paling tidak, ada enersi horizontal yang menghubungkan masyarakat sipil untuk memelihara kepentingan bersama terhadap perubahan. Enersi itu tidak dipersatukan oleh ideologi atau paradigma feminis, tentu saja. Tetapi horizontalisasi politik yang diperlihatkan oleh “politik relawan” itu adalah paralel dengan politik feminis: dehirarkisasi kekuasaan.

Tetapi suatu evaluasi kritis terhadap “politik horizontal” ini juga diperlukan untuk memberi kita pandangan yang lebih kritis terhadap hakekat kekuasaan, yaitu bahwa jarak antara “politik relawan” dan “konstruksi patriarkisme partai” akan kembali hadir begitu politik masuk dalam realitas formalistiknya. Artinya, voluntarisme seorang presiden akan kembali pada konstruksi riil politik sehari-harinya, yaitu pragmatisme kekuasaan. Tentu ada harapan untuk melihat sejumlah tindakan “afirmatif” dari presiden nanti terhadap tuntutan “tacit” politik relawan: kesetaraan, non-feodalistik, pro-HAM, pro-etika lingkungan, paham LGBT, dan seluruh kebutuhan demokrasi substantif. Tetapi justru di sini soal-soal pasca Pemilu dimulai. Yaitu bahwa meredupnya “faktor relawan”, yang memang bersifat ad-hoc, akan melapangkan kepentingan-kepentingan oligarkis dan hirarkis yang sejak awal bekerja dalam “strategi besar” kemenangan Pemilu. Di sini, jarak antara “posisi etis” dan “posisi pragmatis” akan melebar perlahan-lahan mengikuti “keseharian politik”. Persoalannya adalah sederhana: eforia lapangan tak mungkin diperpanjang atau dipindahkan ke dalam ruang politik formal, ruang yang dikuasai “elite oligarki”.

Faktor ini amat struktural, karena sejak awal politik memerlukan infrastruktur kapital yang disediakan di luar voluntarisme masyarakat sipil. Dalam persaingan politik yang kontrasnya tak sungguh-sungguh final, pragmatisme pasca Pemilu akan mengorganisasikan kepentingannya mendahului imperatif “etika publik” yang menjadi dasar partisipasi politik relawan. Di sini kita bertemu dengan soal yang

selalu berulang: “election” tak selalu sejalan dengan “decision”. Diktum universal inilah yang kini hendak diuji pada tahap awal pelebagaan pemerintahan baru: komitmen pada HAM, komitmen pada pluralisme, komitmen pada minoritas, komitmen pada lingkungan, dan seterusnya. Infrastruktur politik Pemilu yang lalu juga kuat ditandai oleh “aktivitas ekstra sipil”. Yaitu keterlibatan militer, minimal dalam pengaruh. Bahkan Presiden perlu beberapa kali memberi pernyataan pers yang bernuansa “teguran” agar ABRI netral. Infrastruktur keamanan dan intelijen ini juga berpengaruh dalam proses paca Pemilu, yaitu ketika suara mulai dihitung oleh Komisi Pemilihan Umum. Dalam nuansa yang serba indikatif, tetap terasa suatu kondisi yang seakan-akan membenarkan sinisme publik bahwa penyelenggaraan pemilu juga diikuti oleh aktivitas intelijen aparaturnegara. Faktor ini akan dicatat sebagai indikasi bahwa di belakang politik sipil pada Pemilu 2014 ini, kuat terasa pengaruh lobi dan faksi-faksi purnawirawan militer dalam menentukan kepemimpinan politik sipil.

Suatu kondisi “post-praetorian”, justeru muncul setelah pelebagaan politik sipil berlangsung 15 tahun setelah reformasi. Ini berarti bahwa masih ada potensi bekerjanya kultur politik Orde Baru di era politik reformasi sekarang ini. Kondisi inilah yang ikut menegangkan politik di hari-hari menjelang pemungutan suara pada 9 Juli 2014 itu. Berbagai isu kegentingan yang diterima publik memang cukup masuk akal mengingat persaingan politik antara dua kubu calon presiden, Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla, sekaligus menjadi arena konfrontasi intelijen dalam soal isu HAM dan rahasia militer pada kasus “Penculikan Aktivistis” dan “Peristiwa Lengser Suharto”. Pada situasi semacam itu, jelas bahwa isu politik menjadi isu patriarkis. Bahwa politik telah diajarkan ke dalam masyarakat sebagai “perang” dan “intrik” dan “fitnah”. Kampanye hitam menjadi satu-satunya bahan kampanye, karena tak ada ide distingtif yang sebetulnya dimiliki kedua kubu.

Perdebatan antara kandidat sebetulnya masih jauh dari standar debat dua calon pemimpin negara. Kekayaan ide dan kematangan intelektual, tak nampak dalam lima seri debat publik itu. Konsep-konsep dasar mengenai kebijakan publik dan arah kemajuan bangsa tak dapat diuraikan secara jernih, karena sangat kentara bahwa kedua calon presiden tidak secara organik memahami apa yang sesungguhnya menjadi konsep strategis yang hendak diunggulkan. Bahwa sejumlah

program telah dituliskan dalam materi kampanye berupa dokumen politik resmi tentang visi-misi masing-masing capres, tetap tak memperlihatkan penguasaan dalam penyampaian di forum debat. Ini berarti bahwa formulasi tim sukses memang berbeda dengan kapasitas pemahaman konseptual para capres itu sendiri. Di sinilah masalah utamanya: bahwa suatu pikiran konseptual yang tidak berasal secara otentik dari calon pemimpin itu sendiri, akan mengalami kesulitan ketika pikiran itu hendak diwujudkan sebagai “komitmen” kepada konstituen.

Komitmen adalah pengetahuan yang sudah lengkap. Komitmen adalah konsep yang sudah terstruktur. Ia menjadi janji karena memang dimaksudkan untuk diwujudkan. Pada segi inilah sangat mungkin “kepentingan perempuan” terlupakan, karena untuk memahami “keadilan” dari perspektif perempuan, jelas memerlukan pengetahuan konseptual yang otentik pada calon presiden. Pendampingan dimungkinkan, tetapi otentisitas harus berasal secara koheren dari pikiran sang pemimpin. Terus terang, konsep-konsep feminis sangat kurang terungkap sebagai bahan debat dalam persaingan politik Pilpres 2014 ini. Memang hiruk-pikuk lebih terjadi karena isu-isu kampanye hitam, dengan akibat fokus terhadap “politik perempuan” tidak terlirik pers. Hanya dapat dirasakan bahwa nuansa “feminin” ada pada sosok Jokowi, dan yang “maskulin” pada sosok Prabowo. Tetapi kesan itu adalah kesan panggung. Bukan kesan yang melekat secara konseptual pada masing-masing capres, apalagi pada dimensi yang lebih luas: pada masing-masing kubu, dan pada kultur dari masing-masing partai pendukung.

Tetapi kesan “politik feminis”, justeru datang dari profil politik relawan pada kubu Jokowi. Yaitu profil tokoh-tokoh publik, aktivis LSM dan pekerja seni yang secara sukarela terlibat dalam dukungan terhadap Jokowi. Sementara “politik patriarkis”, cukup melekat pada profil partai-partai koalisi pendukung Prabowo yang berasal dari partai berbasis agama dan Golkar yang dianggap berpostur Orde Baru. Tetapi sekali lagi, kesan itu tidak dengan sendirinya memperlihatkan “struktur politik feminis” dalam program kubu Jokowi. Artinya, suatu evaluasi yang mendasar yang secara radikal dimaksudkan untuk menguji konsep kepemimpinan dan program pemerintahan Jokowi kelak, masih harus dibuktikan dalam pengamatan yang komprehensif. Dengan kata lain, dukungan yang relatif lebih, yang diberikan pemilih

perempuan kepada Jokowi (55%) dibanding kepada Prabowo (45%), masih cenderung bersifat dukungan personal karena alasan yang lebih “kultural”, ketimbang alasan “rasional” yang melihat program “politik feminis” di kubu Jokowi. Figur “Orba” pada Prabowo dan latar militer yang ia bawa, serta catatan HAM yang terus dipersoalkan padanya, memang membawa kontras kultural dengan figur sipil pada Jokowi. Tetapi tentu bukan aspek itu yang menentukan visi feminis seorang pemimpin.

Perspektif Perempuan

Bila anda seorang eko-feminis misalnya, apa yang akan anda komentari dari dua proposal kampanye oleh dua capres itu. Prabowo hendak mencetak 25 juta hektar sawah. Jokowi setengah mengkritik, menyatakan, perlu lebih dahulu membangun 5 bendungan raksasa supaya ada air untuk mengairi sawah-sawah itu. Ada debat yang agak naif di antara keduanya bila yang menyaksikannya adalah seorang eko-feminis. Karena, itu berarti kedua calon presiden itu akan bahu membahu memabat hutan demi mewujudkan programnya. Bila anda tinggal di tepi hutan, maka Prabowo memerlukan setengah hutan anda untuk dialihfungsikan menjadi sawah, lalu Jokowi memerlukan setengah sisanya untuk dijadikan sumber air bendungan-bendungannya. Dan anda kehilangan “ruang hidup otentik” anda. Mungkin terdengar ekstrem, tetapi begitulah perspektif feminis mengajukan kritik: radikal agar bermutu.

Prinsip itu berlaku untuk menguji keutuhan perspektif feminis pada program-program bidang lain di kedua kubu. Tetapi sekali lagi, kesempatan itu kurang tersedia dalam perbincangan politik yang lalu karena isi politik kampanye sangat didominasi oleh retorika panggung dan politik kampanye hitam. Satu-satunya garis tipis yang menjadi semacam pegangan publik adalah bahwa Jokowi mewakili suatu suasana politik yang relatif lebih “demokratis” dibanding Prabowo. Dan sugesti inilah yang sangat mungkin mencitrakan Jokowi sebagai sosok yang kelak akan lebih partisipatif pada politik feminis, pada politik kesetaraan dan politik keadilan sosial. Tentu ada kepentingan politik perempuan dengan Pemilu 2014 ini. Yang paling mendesak adalah penghapusan Perda-Perda misoginis. Yaitu sejumlah besar Peraturan Pemerintah Daerah yang terang-terangan menghalangi aktivitas publik

perempuan. Masalah ini bukan sekedar urusan revisi cara pandang hukum terhadap tubuh perempuan, melainkan juga menyangkut seluruh infrastruktur kebudayaan yang membenarkan politik yang feodalistik dan patriarkis. Pada isu ini, kepentingan perempuan adalah sejajar dengan kepentingan perjuangan demokrasi untuk menghasilkan kesetaraan hak warganegara dan penghormatan kepada kemajemukan pandangan hidup.

Tidak ada perubahan politik tanpa perubahan dalam cara negara menyelenggarakan keadilan bagi seluruh warga. Bahkan tidak ada perubahan cara negara memahami keadilan bila tidak ada pemihakan terhadap politik perempuan yang masih dilemahkan oleh struktur-struktur pengetahuan yang buta huruf terhadap feminisme. Jadi dalam tema besar “kesetaraan dan pencerahan” lah, politik perempuan berkepentingan dengan Pemilu 2014 ini. Seorang presiden, dari perspektif politik perempuan, harus juga seorang feminis. Yaitu ia yang paham tentang keadilan dan kesetaraan manusia, dan pemahaman itu memang tumbuh secara organik dari watak personal dan dari rekor kepemimpinannya. Suatu standar etik feminis yang diposisikan secara maksimal, adalah imperatif politik yang diperlukan untuk menguji sejauh apa capaian demokrasi kelak akan membawa perubahan dalam cara kita bernegara, dalam cara kita menyelenggarakan kebijakan publik, dalam cara kita melayani perbedaan pengalaman warganegara, dalam cara kita menghormati pilihan orientasi seksual warganegara, dalam cara kita memperlakukan tubuh perempuan.

Politik dalam perspektif perempuan adalah keseluruhan orientasi kekuasaan yang harus memahami bahwa “personal is political”. Jadi, bukan karena tema-tema besar pembangunan atau isu-isu strategis di bidang keamanan dan makro ekonomi saja, yang merupakan isu publik. Turunan dari isu-isu strategis itu harus terasa dalam pengalaman hidup sehari-hari perempuan: pada akses hukum, akses keuangan, akses politik lokal, keamanan tubuh, ketersediaan infrastruktur kesehatan, lingkungan hidup yang lestari, dst. Bila imperatif ini diucapkan sebagai syarat partisipasi perempuan dalam politik hari ini, maka sejak awal kita tahu bahwa kapasitas itu tak mungkin ditagihkan sepenuhnya kepada para calon presiden itu. Logika politik feminis bahkan terlalu asing bagi kultur politik kita di sini. Asal usul politik anggota parlemen maupun sumber daya manusia di dalam birokrasi kita terlalu minim dalam hal pengetahuan dan kesadaran terhadap “keadilan politik perempuan”.

Kedudukan perempuan dalam lembaga-lembaga publik kita masih terhitung sebagai kedudukan “seseorang berjenis kelamin perempuan”, dan bukan kedudukan “politik perempuan”. Cara pandang tentang pembangunan berperspektif gender telah lama diajukan PBB, tetapi cara pandang pembuat kebijakan lokal masih dikuasai perspektif oligarki-patriarkis. Kekuasaan hanya dibagi dalam persekongkolan elite, dengan akibat sumber daya dan akses keadilan tak terawasi oleh pemilih. Partisipasi politik perempuan dimaksudkan sekaligus untuk mengakhiri politik oligarkis, yaitu sumber eksklusif penguasaan pembuatan kebijakan. Oligarki mengendalikan politik sejak rancangan undang-undang. Oligarki mengendalikan politik dengan cara mengendalikan para pembuat undang-undang. Keterbukaan politik parlemen dalam proses pembuatan undang-undang adalah kepentingan utama politik perempuan. Dalam rangka itu, partisipasi perempuan dalam memilih pemimpin negeri adalah partisipasi untuk menghasilkan perundang-undangan yang bersih, yang ditempuh secara adil. Minimal dalam makna “membuat undang-undang secara bersih dan adil” itu, politik perempuan menjalankan partisipasi demokratisnya.

Pers dan Etika Publik: “Kekurangan Nalar” Hannah Arendt

Keseluruhan isi politik pada Pemilu 2014, sesungguhnya ditentukan oleh persaingan frontal opini publik yang diselenggarakan oleh media masing-masing kubu. Sebetulnya ada yang cacat dalam cara pembelahan pers yang semacam itu. Memang ada tuntutan pemihakan yang seolah-olah memperlihatkan “duel hitam-putih” antara kubu Prabowo dan kubu Jokowi. Tetapi pers sebetulnya kurang mendalam dalam memperlihatkan “struktur dalam” dari masing-masing kubu. Bila pers hendak memihak, maka itu sah untuk dilakukan setelah seluruh kontras etis di antara dua kubu itu diperlihatkan tuntas kepada publik. Kesan bahwa seluruh media utama memberi semacam “perlindungan” kepada kubu Jokowi, adalah akibat dari serangan kampanye hitam yang dianggap datang dari kubu Prabowo. Tetapi sekaligus dengan sikap “membentengi” itu, terbentengi juga aspek-aspek lain di kubu Jokowi, sehingga seolah-olah Jokowi tampil tanpa cacat. Bahwa oligarki juga bekerja dalam kubu Jokowi, dan bahwa kultur feodalistik belum terkikis dalam kubu Jokowi, telah luput dari kritisisme pers. Juga bahwa persoalan pelanggaran HAM ada pada

kubu Jokowi, tak dibicarakan seintensif pembicaraan yang sama pada kubu Prabowo. Bahwa kekuatan kapital juga terdapat pada kedua kubu, tak juga dibahas pers secara berimbang.

Tentu, demi tanggung jawab etika publik, ketakseimbangan itu haruslah dicatat sebagai kekurangan dalam profesionalitas lembaga-lembaga pemelihara demokrasi. Bahwa ada eforia untuk menghasilkan “reformasi jilid 2”, sekali-kali tidak boleh menghasilkan ketakkritisan pers terhadap para capres. Pada titik evaluasi opini publik, kita tidak menghitung frekuensi dan jumlah kampanye hitam di media masing-masing kubu, melainkan memaparkan secara transparan dan obyektif seluruh cacat di kedua kubu. Tetapi pada Pemilu 2014 ini, pers kehilangan keseimbangan rasionalnya karena terlibat langsung dalam “duel politik” yang dianggap “duel etis” itu. Pemihakan telah dianggap sebagai tuntutan etis, padahal yang sedang berduel adalah dua kubu yang tak sepenuhnya kontras secara etis. Jebakan inilah yang membelah publik ke dalam emosi yang tinggi yang sekaligus menciptakan stigma dalam cara kita memelihara demokrasi di masa depan. Yaitu bahwa pers belum mampu mengolah tensi politik publik menjadi diskursus kritis yang menghasilkan cara pandang bermutu, untuk disajikan sebagai peralatan rasio publik dalam demokrasi.

Pelajaran penting harus diambil bahwa dalam kepungan oligarki, yang juga menguasai institusi media massa, pers sebagai “profesi” harus memiliki mata ketiga, yaitu mata pikiran untuk menilai kedalaman perspektifnya sendiri ketika politik menjadi permainan para oligark media. Melekat dalam etika publik adalah etika profesi, yaitu prinsip bahwa pers hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Suatu tanggung jawab yang melampaui eforia politik yang terbawa arus besar keramaian semata. Tanggung jawab pers pada dirinya sendiri berarti tanggung jawab untuk mencerdaskan dirinya sendiri, sebagai manifestasi dari rasio publik. Rasio publik harus tetap dijaga pada suhu kritisisme. Dengan menjadi cerdas, pers menjadi penjaga kesehatan akal publik.

Kita dapat belajar dari kritisisme Hannah Arendt, seorang filsuf perempuan, ketika meliput pengadilan tokoh Nazi, Adolf Eichmann, yang membuat kesimpulan kritis terhadap kondisi akal sang pembunuh. Arendt menentang opini publik yang sedang dalam eforia balas dendam, dan tanpa berpihak ia menerangkan kondisi politik yang sesungguhnya, yaitu bahwa Eichmann ada dalam kondisi

“kekurangan pikiran”. Bahwa kejahatan Eichmann adalah akibat dari ketakmampuannya untuk berpikir (Arendt, 1977). Di situasi politik semacam ini, seseorang bukan lagi subyek politik, melainkan sekedar fungsi dari suatu mekanisme kekuasaan. Pendangkalan kemanusiaan itulah yang membuat kejahatan menjadi banal. Jurnalisme Arendt mampu melihat kondisi tersembunyi dari antropologi kejahatan. Dan dalam perspektif radikal itu Arendt menyodorkan pelajaran penting: publik memerlukan pikiran (Arendt, 1958). Dan pers bertugas untuk itu.

Tanggung jawab pers adalah mengambil posisi kritis dalam situasi ketiadaan pegangan publik tentang isu-isu strategis. Kematangan pers diukur dalam kedalaman mata pikirannya untuk membaca politik “between the lines”. Tentu selalu ada alasan bahwa dukungan pers terhadap calon presiden bukanlah “cek kosong”. Tetapi pada kondisi Pemilu yang lalu, perslah yang justeru memelopori pemberian “cek kosong” kepada para capres, karena langsung terlibat dalam kampanye partisan, menjadi corong di dua kubu. Karena itu, bila ada konstetasi bahwa “bangsa terbelah” oleh Pemilu ini, maka sesungguhnya yang terjadi adalah pembelahan opini publik melalui “pers yang terbelah”. Memahami Politik Pilpres 2014 dalam konstruksi etika publik, menghendaki posisi pers yang sungguh-sungguh berjarak. Bukan sikap netral, tetapi sikap kritis untuk menyajikan kondisi sesungguhnya dari suatu persaingan politik, lengkap dengan motif, infrastruktur kapital, kondisi internal dan peta oligarki di belakang persaingan itu. Pers dan etika publik adalah pokok panduan demokrasi yang paling diandalkan dalam masa transisi politik seperti sekarang ini, di sini.

Etika publik menghidupi politik jangka panjang. Pemilu adalah proses rutin lima tahunan. Karena itu, investasi integritas pers adalah investasi jangka panjang untuk menumbuhkan etos kritis sebagai pelajaran utama menjadi warganegara yang bertanggung jawab. Etika republikanisme ini hendaknya menghidupkan sinisisme bahwa selalu ada ambisi yang tak terlihat di belakang politik populisme, ambisi yang seringkali tersamar. Feminisme adalah cara pandang yang harus peka terhadap kondisi-kondisi patriarkis yang paling samar sekalipun, yang potensial menduduki hirarki kekuasaan pada saat politik kembali pada watak formalistiknya. Pers dan kritisisme ada dalam proyek feminis, bila ketajaman untuk menemukan konstruksi oligarkis mendahului eforia voluntarisme yang disodorkan dalam konstruksi politik “kawan-

lawan”, yang sebetulnya tak sungguh-sungguh kontras. Pembentukan opini dan konstruksi semacam ini seringkali adalah bentuk permainan kekuasaan yang latar historisnya bermula pada dendam, transaksi kapital, maupun ambisi dari suatu kelompok yang hegemonis.

Perspektif feminis seharusnya bertumpu pada sumbu sejarah yang lebih panjang, yang memungkinkan kritisisme dihidupkan, untuk mengatasi jebakan-jebakan patriarkis dalam setiap peristiwa politik strategis, seperti Pemilu. Artinya, euforia pada peristiwa politik tidak boleh menutup nalar kritis untuk mengawasi peluang kembalinya kultur feodal, politik hirarki dan hegemoni kapital dalam menentukan isu dan kebijakan publik nantinya. Pers dan feminisme, pada kondisi semacam itu seharusnya dapat melampaui konstruksi “kawan-lawan” yang sebetulnya sarat dengan kepentingan patriarkis. Metafor “kawan-lawan” itu sendiri, sebetulnya bukanlah metafor yang feminis. Etika publik dan jurnalisme kritis hanya tumbuh dalam kondisi “kecukupan pikiran”, yaitu kondisi yang meniti dengan hati-hati pematang kecil demokrasi yang masih rawan longsor oleh beban-beban kepentingan oligarki di kedua kubu yang bersaing frontal itu.

Teater Ambisi

Pemilu yang lalu memang digairahkan oleh konfrontasi dua kubu, karena inilah pertama kali demokrasi kita diujikan secara frontal dalam kondisi “kawan-lawan”. Gagalnya Konvensi Partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga berkedudukan sebagai Presiden RI, dalam menghasilkan calon presiden ketiga, memperkuat frontalisasi itu. Tetapi di belakang konfrontasi ini, berdiri politik ambisi yang sesungguhnya. Jauh mendahului perang kampanye hitam, kita sudah mengerti adanya transaksi politik elit antara Megawati dan Prabowo, dalam apa yang disebut “Perjanjian Batutulis”. Lepas dari berbagai tafsir kondisionalitas yang membatalkan transaksi itu, jelas bahwa kepentingan publik seolah-olah hanya ditentukan oleh tukar tambah politik semacam itu. Bahwa giliran kepemimpinan sudah ditentukan secara elitis mendahului perkembangan dinamika masyarakat sipil, yaitu konstituen sesungguhnya dari demokrasi. Aspek keperdataan dari suatu perjanjian menghendaki kewajiban pada para pembuatnya. Prinsip *pacta sunt servanda* berlaku dalam ikatan privat antara mereka. Integritas masing-masing pihak terukur dalam

tuntutan etis pemenuhan kewajiban itu. Siapa pembohong, siapa yang jujur, mudah untuk diperiksa secara norma keperdataan maupun norma moral publik.

Tetapi lebih dari soal itu adalah bahwa di belakang perjanjian semacam itu, ada pengabaian terhadap keterbukaan politik. Juga terhadap hak publik untuk tidak diikat oleh perjanjian yang konsekuensinya tak diketahui publik sejak awal. Jadi, kita menangkap suatu permainan privatisasi kekuasaan yang dasarnya adalah ambisi politik elitis. Konstruksi inilah yang menjelaskan meningkatnya suhu permusuhan politik di antara dua kubu itu pada Pemilu 2014. Pada Pemilu ini, kita sebetulnya menyaksikan dua peristiwa di panggung yang sama. Di panggung depan ada kemeriahan, juga ada ketegangan. Di belakang panggung ada perencanaan, juga strategi ambisi. Publik terlibat dalam politik emosi, tapi luput memperhatikan politik ambisi. Bahwa di kedua kubu bekerja suatu strategi ambisius yang memanfaatkan seluruh kemampuan demagoginya untuk merebut opini publik. Slogan-slogan populisme diucapkan di semua panggung. Doktrin-doktrin lama seperti tercurah dari corong-corong suara di depan massa. Tetapi bagaimana sebetulnya publik membedakan antara populisme Prabowo dan populisme Jokowi, antara versi Prabowo tentang Sukarnoisme dan versi Jokowi?

Jelas terbaca kontradiksi dalam watak ideologi antara Prabowo dan wakilnya, Hatta Rajasa dalam pemahaman tentang "makna demokrasi". Bahwa yang satu memahaminya sebagai "alat", dan yang lain menerangkannya sebagai "nilai". Tetapi juga terbaca ketaktuntasan ide Sukarnoisme dalam visi Jokowi tentang "revolusi mental", dengan pemahaman wakilnya, Jusuf Kalla, yang mengisi konsep itu dengan cara yang lebih "pragmatis-ekonomi". Ambisi politik memang telah mendahului kejernihan konseptual. Sekali lagi, Pemilu ini lebih terasa sebagai ajang ambisi di teater politik, ketimbang kontes pikiran yang tajam dalam menunjukkan arah politik lima tahun ke depan. Problem ini akan cepat terasa ketika pembuatan kebijakan berhadapan dengan realitas keras dalam pilihan-pilihan politik yang terbatas, baik pada skala lokal maupun global.

Ideologi populisme misalnya akan segera berhadapan dengan hal kongkrit dalam politik anggaran, yaitu APBN yang dibebani sangat berat oleh politik subsidi energi. Demikian juga perjanjian-perjanjian internasional terutama di sektor ekstraktif yang harus dihormati oleh

pemerintahan manapun bila hendak ikut dalam sistem rasionalitas ekonomi global. Atau pada tingkat lokal, dimana politik masih sangat dikuasai oleh arogansi otonomi daerah yang isinya adalah kartel dan oligarki politik lama. Jelas bahwa isi ideologi yang melandasi visi-misi dan program para capres, sebetulnya tak terkonsepkan secara koheren dalam paradigma ideologis yang bersaing. Sebaliknya, ambisi politik terlihat lebih nyata dalam berbagai pernyataan publik yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh kunci di kedua kubu. Intinya adalah bahwa persaingan politik pada Pemilu ini masih terlalu dikendalikan oleh politik penguasaan, entah atas motif dendam, entah atas kehausan kekuasaan semata. Ada debat ramai di media massa. Tetapi isinya lebih banyak mengenai perkelahian masa lalu, ketimbang perdebatan konseptual.

Kepentingan feminis tentu melampaui penampilan politik di teater ambisi itu. Partisipasi politik perempuan mengenali secara jernih permainan ambisi politik itu. Dan hanya karena alasan utilitarianlah sebetulnya suara politik feminis cenderung mengarah kepada kubu Jokowi. Tetapi segera harus diingatkan bahwa figurisasi Jokowi adalah bersifat "ad hoc" dalam Pemilu ini, karena dikotomi politik langsung tersaji antara figur sipil dan militer di dua kubu itu. Artinya, bila ujian politik feminis harus diajukan secara radikal kepada kubu pendukung Jokowi, maka segera terlihat ketakcukupan pemihakan itu. Feodalisme tetap masih berbayang di PDIP, partai utama koalisi Jokowi. Jajaran purnawirawan militer di kubu Jokowi yang juga masih dibayangi soal HAM, tentu bukan pilihan politik feminis. Jusuf Kalla juga bukan figur yang diidealkan politik feminis. Memang ada konstruksi yang cukup dipersiapkan oleh sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat sipil untuk mendekati Jokowi kepada paradigma politik feminis. Tetapi tentu strategi ini masih terlalu sederhana, karena memerlukan perekat otentik untuk menginvestasikan nilai-nilai feminis dalam alam pikiran politik seorang figur yang berada dalam lingkungan politik yang masih patriarkis.

Penutup: Etika Feminis

Teater Ambisi adalah pentas lima tahunan. Politik feminis adalah investasi peradaban. Dalam jalan pikiran itu kita mengevaluasi Pemilu 2014 ini. Politik feminis telah lama mengetahui bahwa

menjadi perempuan dan mengalami ketidakadilan adalah satu paket sosiologi yang diselenggarakan oleh sistem patriarki. Bahwa keperluan perubahan politik tidak saja memerlukan partisipasi lapangan, tapi terlebih ketajaman diskursus dalam membaca struktur ketidakadilan itu. Itulah sebabnya diperlukan terus-menerus pemahaman teoretik yang kuat agar euforia politik lapangan itu tidak menghanyutkan peralatan-peralatan konseptual feminis, yaitu peralatan pikiran dan keyakinan tentang keadilan yang lebih radikal. Politik feminis juga memahami bahwa upaya menyelenggarakan keadilan itu, pada momen-momen kritis seperti Pemilu, memerlukan “strategi jangka pendek” untuk secara minimal mencegah masuknya watak otoritarian dalam politik. Tetapi politik feminis tetap melihat politik dalam strategi jangka panjang, yaitu penguatan institusi-institusi demokrasi yang sungguh-sungguh bertumpu pada ide kesetaraan dan pencerahan manusia.

Percakapan kebudayaan adalah kepentingan politik feminis. Yaitu percakapan tentang nilai, etika dan penghormatan pada pandangan hidup yang berbeda. Pada dimensi kultural ini, politik feminis menumbuhkan suasana yang memungkinkan partisipasi politik horizontal mempertahankan cirinya sebagai “politik masyarakat”, dan bukan transisi menuju “politik negara”. Demarkasi antara kultur dan negara inilah yang harus dipertahankan agar voluntarisme yang diberikan melalui “politik relawan” pada Pemilu lalu, tidak berubah menjadi “tiket-tiket kecil” dari mereka yang sebetulnya hendak ikut dalam “Teater Ambisi”. Kita telah terlibat dalam adu politik yang melelahkan. Terlibat dalam panggung yang tak sepenuhnya kita kenal. Suatu harapan tentang perubahan telah menggerakkan inisiatif masyarakat untuk “mengawal” pembentukan kekuasaan baru, dalam semangat kerelawanan yang anonim secara ideologis. Ini suatu pengalaman politik baru. Di situ ada pelajaran penting, bahwa rasio publik, akal sehat politik, selalu dapat kembali diaktifkan manakala politik berada dalam kedaruratan.

Bagi etika feminis, kepedulian terhadap politik adalah kepedulian terhadap peluang untuk merayakan pengalaman-pengalaman solidaritas. Suatu intensi politik yang digerakkan oleh etika feminis, niscaya menghendaki kejujuran etis yang otentik. Yaitu kejujuran untuk mengukur diri sendiri apakah pengalaman solidaritas itu bertumbuh secara unik dari dalam kesadaran “gerakan feminis”, atau sekedar terjadi karena euforia “kawan-lawan”. Pertanyaan reflektif ini akan kita

bawa dalam suasana baru pemerintahan baru nanti. Tetapi lebih dari itu, pertanyaan reflektif itu sekaligus diajukan pada gerakan feminis itu sendiri: sejauh mana kita telah otentik dalam menerjemahkan etika feminis ke dalam percaturan politik di Pemilu 2014 ini. Demokrasi masih harus kita rawat. Terutama setelah sejumlah institusi utamanya – pers, kampus, lembaga survey – bertarung dan membangkitkan huru-hara opini publik. Pedagogi paska Pemilu adalah pedagogi untuk merawat ulang tubuh dan pikiran politik yang terkulai oleh pertarungan patriarkis. Politik feminis masih akan terlibat dalam pembenahan itu. Tetapi kali ini bukan karena konstruksi “kawan-lawan”, melainkan karena tanggung jawab untuk melanjutkan peradaban.

Daftar Pustaka

- Arendt, Hannah. 1958. *The Human Condition*. Chicago: Univ of Chicago Press.
- . 1977. *Eichmann in Jerusalem: A Report of the Banality of evil*, revised and enlarged edition. New York: Penguin Books.
- Laporan Indeks Pembangunan Manusia. Bappenas. “Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010-2014” Diakses Juli 2014.
- <http://www.bappenas.go.id/files/1613/7890/3140/Buku-Evaluasi-Paruh-Waktu-RPJMN-Bappenas.pdf>